# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2022 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

## 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi.

Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Masukan *(inputs)* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
b. Keluaran *(outputs)* adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
c. Hasil *(outcomes)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
d. Manfaat *(benefits)* adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;

e. Dampak *(impacts)* adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2021 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

| No | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|---|---|---|
| 1 | Lebih dari 100% | Baik Sekali (BS) |
| 2 | Lebih dari 85% sd. 100% | Baik (B) |
| 3 | Lebih dari 65 % sd. 85% | Cukup (C) |
| 4 | Lebih dari 50% s.d 60 % | Kurang (K) |
| 5 | Kurang dari 50 % | Sangat Kurang (SK) |

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2022 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | % Capaian Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Tujuan** | | | | |
| 1 | Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 83 | 87,69 | 105,65% |
| | **Sasaran** | | | | |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun | 86,34 | 88,55 | 102,55% |

## 3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen tahun 2022 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL | NILAI INTERVAL KONVERSI | MUTU PELAYANAN | KINERJA UPP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 – 2,599 | 25,00 – 64,99 | D | Tidak baik |
| 2 | 2,60 – 3,064 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang baik |
| 3 | 3,064 – 3,532 | 76,61 – 88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,532 – 4,00 | 88,31 – 100,00 | A | Sangat baik |

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

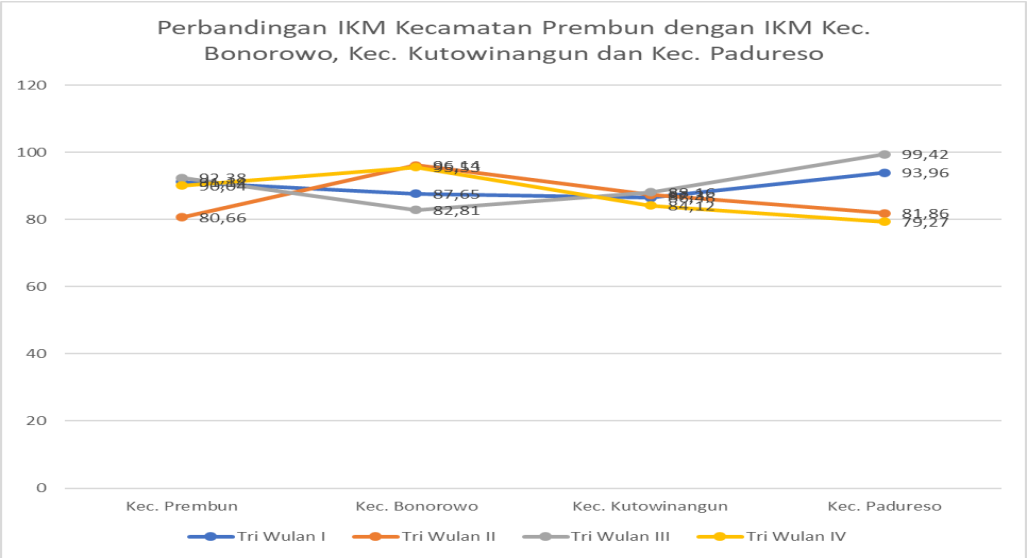
| No | Indikator sasaran | Realisasi 2021 | Tahun 2022 | | | Target akhir 2026 | Tingkat Kemajuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4) | 7 | 8 (5/7) |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 82,18 | 86,34 | 88,55 | 102,55% | 92,42 | 95,81% |

Sumber : Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Prembun, 2022.

Realisasi IKM tahun 2022 (88,55) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2021 (82,18) dikarenakan pada tahun 2022 masyarakat semakin banyak mengisi survai kepuasan masyarakat di Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebesar 102,55% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan target akhir 2026 belum berhasil baru mencapai 95,81% tetapi sudah **Sangat Baik**.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dengan IKM 3 (tiga) Kecamatan dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



IKM Triwulanan Kecamatan Prembun jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Bonorowo Tahun 2022 mengalami kenaikan pada Triwulan I dan III akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Bonorowo pada Triwulan II dan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Prembun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

IKM Triwulanan Kecamatan Prembun jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Kutowinangun Tahun 2022 mengalami kenaikan pada Triwulan I, III dan IV akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Kutowinangun pada Triwulan II namun demikian realisasi IKM Kecamatan Prembun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik

IKM Triwulanan Kecamatan Prembun jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Padureso Tahun 2022 mengalami kenaikan pada Triwulan IV akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Padureso pada Triwulan I,II dan III namun demikian realisasi IKM Kecamatan Prembun masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Perbangingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Prembun dengan IKM di 3 (tiga) Kecamatan Tahun 2022

| No | Unsur | Nilai Kec. Prembun | | Nilai Kec. Bonorowo | | Nilai Kec. Kutowinangun | | Nilai Kec. Padureso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nilai | Kategori UPP | Nilai | Kategori UPP | Nilai | Kategori UPP | Nilai | Kategori UPP |
| 1 | Persyaratan | 87,9 | Baik | 86,79 | Baik | 83,04 | Baik | 85,92 | Baik |
| 2 | Prosedur | 87,5 | Baik | 86,94 | Baik | 86,27 | Baik | 86,40 | Baik |
| 3 | Waktu Pelayanan | 85,79 | Baik | 87,45 | Baik | 81,74 | Baik | 86,53 | Baik |
| 4 | Biaya/Tarif | 98,36 | Sangat Baik | 97,66 | Sangat Baik | 99,53 | Sangat Baik | 99,70 | Sangat Baik |
| 5 | Produk Layanan | 87,1 | Baik | 90,08 | Sangat Baik | 84,59 | Baik | 85,47 | Baik |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 88,22 | Baik | 88,70 | Sangat Baik | 88,27 | Sangat Baik | 88,01 | Baik |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 87,81 | Baik | 88,83 | Sangat Baik | 86,09 | Baik | 89,20 | Sangat Baik |
| 8 | Sarana dan Prasarana | 86,73 | Baik | 89,14 | Sangat Baik | 82,64 | Baik | 82,34 | Baik |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 95,59 | Sangat Baik | 99,20 | Sangat Baik | 86,42 | Baik | 93,63 | Sangat Baik |

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Prembun rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Sarana dan Prasarana, Produk layanan dan Prosedur.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Sarana dan Prasarana rencana tindak lanjut perbaikannya adalah melakukan rehab ringan agar ruang pelayanan PATEN lebih baik.
2. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah menetapkan dan mengiformasikan kepada pengunjung serta mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.
3. Unsur Produk Layanan tindak lanjut perbaikannya adalah Menginformasikan melaui pertemuan Lintas Sektor dan Pertemuan di Desa serta menginformasikan melaui Webshet dan Media sosial (facebook, instagram, twitter).

## 3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2022. Secara lebih rinci sebagai berikut:

### 3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

| Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Menunjang / Tidak Menunjang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan** | | | | | | |
| Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 105,65% | | | | |
| **Sasaran** | | | | | | |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Prembun | 102,55% | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** | Cakupan Pelayanan Penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | Menunjang |
| | | | **Kegiatan, Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | **Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasiperangkat daerah** | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun ( Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Renstra 2026) | 100% | Menunjang |
| | | | Sub kegiatan Evaluasi | Jumlah dokumen evaluasikinerja perangkat daerah | 100% | Menunjang |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kinerja Perangkat Dearah | yang tersusun (Dalev, SAKIP,LKPJ,LKJiP, SPIP, LPPD) | | |
| | | | **Kegiatan ,Administrasi keuangan perangkatdaerah** | **jumlah bulan administrasi keuangan perangkatdaerah** | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan gaji dantunjangan ASN | Jumalh ASN yang mendapatkan gaji danTunjangan | 100% | Menunjang |
| | | | Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD yang tersusun ( GU,TU,UP,LS) | 100% | Menunjang |
| | | | **Kegiatan Adminstrasi kepegawaian perangkat daerah** | **Jumlah orang peserta peningkatan kapasitas** | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Bimbinganteknis implementasi peraturan perundang undangan | Jumlah peserta peningkatan kapasitas | 100% | Menunjang |
| | | | **Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah** | **jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah** | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunankantor | jumlah jenis komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor ( kabel,lampu,terminal , saklar) | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan barangcetakan dan penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan bahan material | jumlah bulan penyediaan bahan /material | 100% | Menunjang |
| | | | Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggaraan | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Penatausahaan arsipdinamis pada SKPD | Jumlah bulan fasilitasi arsip | 100% | Menunjang |
| | | | **Kegiatan Pengadaan barang milik daerahpenunjang urusan pemerintah daerah** | **Jumlah unit pengadaan barang milik daerahpenunjang urusan pemerintah daerah** | 100% | Menunjang |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranagedung kantor | 100% | Menunjang |
| | | | **KegiatanPenyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusanpemerintah daerah** | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat | jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber dayaair dan listrik | jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umumkantor | 100% | Menunjang |
| | | | **Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerahpenunjang urusan pemerintah daerah** | **Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerahpenunjang urusan pemerintah daerah** | | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak danperizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional | 58,33% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatandan mesin lainnya | Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunanlainnya | jumlah unit pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantordan bangunan lainnya | 100% | Menunjang |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadapPelayanan Publik Kecamatan | 100% | Menunjang |
| | | | Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan camat | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan, pelayanannon perijinan yang dilaksanakan | Jumlah jenispelayanan perizinan yang dilaksanakan ( KTP,KK,Kartu kelahiran,surat | 100% | Menunjang |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | kematian, pindah datang) | | |
| | | | PROGRAM PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Indeks Kondusifitas Kecamatan | 100% | Menunjang |
| | | | Kegiatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum sesuaipenugasan kepala daerah | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan ,Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhannegara Kesatuan Republik Indonesia | jJumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval,Resepsi HUT RI) | 100% | Menunjang |
| | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Prosentase Desa denganIndeks Desa Membangunkatgori maju dan mandiri | 100% | Menunjang |
| | | | Kegiatan ,Fasilitasi , rekomendasi dan koordinasi pembinaandan pengawasan pemerintahan desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan , Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan,Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Fasilitasi kegiatan pengangkatan dan pemberhentian perangkatdesa | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan, Fasilitasi Singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Jumlah dokumen singkronisasi percepatan pembangunan derah dengan pembangunan desa | 100% | Menunjang |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sub Kegiatan, Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Jumah kegiatan fasilitasi penyelengggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan , Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif | jumlah Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan musrenbangdes dan musrenbangcam | 100% | Menunjang |
| | | | Sub kegiatan, Fasilitasi penyusunan programdan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakatdesa | 100% | Menunjang |
| | | | Sub Kegiatan, Koordinasi pendampingan desadiwilayahnya | Jumlah fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDesdan sembako) | 100% | Menunjang |
| Rata-rata | | | | | 98,98% | |

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Setda Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 98,98% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

### 3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Efisiensi Anggaran Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2022

| **Tujuan/Sasaran** | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian | **Tingkat Efisiensi** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tujuan** | | | | | | | |
| Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik | 83 | 87,69 | 105,65% | | | | |
| **Sasaran** | | | | | | | |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Prembun | 86,34 | 88,55 | 102,55% | 2.342.908.000 | 2.246.730.680 | 95,89% | 4,11% |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 4,11% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.